

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

37. Penandaan Penggunaan Penerimaan Dana Bagi Hasil-Sawit (DBH-Sawit) Provinsi

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025 PROVINSI						
								9						
1	2	3	4	5	6	7	8							
1	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN	1 PENANGANAN JALAN	1	Rekonstruksi/peningkatan struktur;	Panjang Jalan yang dilakukan rekonstruksi/ peningkatan jalan	Km	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	
			1	Pemeliharaan berkala;	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berkala	Km	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	1.01	0051	Pelebaran Jalan Menuju Standar	
			3	Pemeliharaan rutin;	Panjang jalan yang dilakukan Pemeliharaan rutin	Km	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	1.01	0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	
		2 PENANGANAN JEMBATAN	1	Pemeliharaan berkala jembatan;	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan berkala	Meter	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	1.01	0047	Pemeliharaan Berkala Jembatan	
			2	Penggantian jembatan; dan/atau	Panjang jembatan yang dilakukan Penggantian	Meter	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	1.01	0046	Penggantian Jembatan	
2	KEGIATAN LAINNYA	1 PENDATAAN PERKEBUNAN RAKYAT (PSR) SAWIT	1	Pembentukan Tim dan Peningkatan Kapasitas Tim	Bimtek	Orang	Pemerintah Daerah	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan pengembangan prasarana, Kawasan dan komoditas pertanian	
			2	Sosialisasi Kegiatan Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat	Pertemuan	Frekuensi	Masyarakat	3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya	
			3	Pendataan pekebun	Sensus	Orang	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	3	27	03	1.01	0013	Pengendalian dan pemanfaatan Kawasan pertanian	
			4	Pemetaan dan Pemeriksaan Lapangan	Survey	Persil	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	
			5	Verifikasi dan Validasi Data Pekebun	Pertemuan	Frekuensi	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan petani	
			6	Penerbitan STDB	Penerbitan surat	Dokumen	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah							
2	KEGIATAN LAINNYA	2 PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) PEKEBUN	1	Pendataan pekebun untuk proses sertifikasi ISPO	Survey	Data Pekebun	a. Pekebun b. Perusahaan c. Pemerintah Daerah	3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya	
			2	Sosialisasi sertifikasi ISPO	Sosialisasi	Orang	Pekebun	3	27	03	1.01	0013	Pengendalian dan pemanfaatan Kawasan pertanian	
			3	Pelatihan sertifikasi calon Auditor ISPO pekebun	Pelatihan	Orang	Pekebun	3	27	03	1.01	0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
			4	Pendampingan Pekebun untuk Sertifikasi ISPO	1) Pembentukan tim kendali internal	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian
					2) Pelatihan Tim ICS	Pelatihan	Orang	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan petani
					3) Penyusunan Prosedur/Mekanisme terkait Pemenuhan Prinsip dan Kriteria ISPO	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah						

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025						
								PROVINSI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
				4) Sosialisasi Prosedur/Mekanisme kepada Anggota Kelembagaan	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah							
				5) Pengelolaan Catatan terkait Aktivitas Pekebun dalam rangka Pemenuhan Prinsip dan Kriteria ISPO termasuk Pengelolaan Catatan Kelompok Tani/Koperasi	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah							
				6) Penyusunan Dokumen Pemenuhan Prinsip dan Kriteria ISPO Pekebun	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah							
				7) Penjadwalan Kegiatan Audit Internal dan Pelaksanaan Audit Internal	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah							
				8) Perbaikan temuan atau ketidaksesuaian pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah							
				9) Penjadwalan audit eksternal	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah							
2	KEGIATAN LAINNYA	3 PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN	1 Pelatihan petugas penilai usaha perkebunan	1) Pelatihan petugas penilai usaha perkebunan	Petugas penilai usaha perkebunan bersertifikat	Orang	Pemerintah Daerah	3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	
			2 Persiapan penilaian	1) Koordinasi Penyusunan Jadwal dan rencana penilaian	Notulen Koordinasi, instrumen penilaian	Dokumen/ Berkas	Pemerintah Daerah	3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	
				2 Pengumpulan Data Sekunder	Data awal realisasi usaha	Dokumen/ Berkas	Pemerintah Daerah	3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	
				3) Pengumpulan subjek dan objek penilaian lapangan	Subjek dan objek terkait usaha perkebunan yang akan dinilai	Dokumen/ Berkas	Pemerintah Daerah	3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	
			3 Pelaksanaan Penilaian Lapangan	1) Verifikasi dokumen perusahaan	Data Hasil Verifikasi	Dokumen/ Laporan/ Berita Acara	Pemerintah Daerah Perusahaan Perkebunan Masyarakat sekitar	3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	
				2) Observasi lapang aspek penilaian usaha perkebunan	Berita Acara, dokumentasi lapangan	Dokumen/ Laporan/ Berita Acara	Pemerintah Daerah Perusahaan Perkebunan Masyarakat sekitar	3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	
			4 Analisis Penyusunan Hasil Penilaian	1) Analisis kepatuhan usaha	Laporan hasil penilaian usaha perkebunan lengkap dengan rekomendasi	Dokumen (Rekomendasi, Sk, Penetapan Kelas Kebun)	Pemerintah Daerah	3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	
				2) Penyusunan Skor/kategori	Laporan hasil penilaian usaha perkebunan lengkap dengan rekomendasi	Dokumen (Rekomendasi, Sk, Penetapan Kelas Kebun)	Pemerintah Daerah	3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	
				3) Rekomendasi tindak lanjut	Laporan hasil penilaian usaha perkebunan lengkap dengan rekomendasi	Dokumen (Rekomendasi, Sk, Penetapan Kelas Kebun)	Pemerintah Daerah	3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025					
								PROVINSI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
			5 Tindak Lanjut Penilaian Usaha Perkebunan	1). Penyampaian hasil penilaian kepada stakeholder 2). Monev dan Pembinaan Tindak Lanjut hasil perbaikan Perusahaan	Materi sosialisasi, laporan diseminasi, publikai ringkas Laporan monitoring tindak lanjut	Frekuensi Dokumen Laporan	Masyarakat, Perusahaan, Perkebunan, DPRD, Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Perusahaan Perkebunan Masyarakat sekitar	3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota
								3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota
2	KEGIATAN LAINNYA	4 PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN	1 Pembentukan tim penyusun	- Koordinasi antar OPD - Penerbitan SK Tim Penyusun	Pertemuan	Frekuensi	Pemerintah Daerah	5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
								4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
								3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
			2 Identifikasi dan pendataan program dan kegiatan	- Koordinasi Tim Penyusun	Pertemuan	Frekuensi	Pemerintah Daerah	5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
								5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
								3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
								X	XX	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
			3 Perumusan rencana aksi	- Asistensi dalam Forum Multipihak) - Rapat Pleno Tim Penyusun	Pertemuan	Frekuensi	Pemerintah Daerah	5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
								5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
								5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
								5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
								3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
								X	XX	01	1.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
								4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
			4 Konsultasi/Uji publik	- Pertemuan dengan Pemangku Kepentingan - Penyempurnaan Rancangan RAD KSB	Pertemuan	Frekuensi	Pemerintah Daerah	5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik
								3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
								4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025						
								PROVINSI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
			5	Penetapan rencana aksi	- Penyusunan dan Penerbitan Peraturan kepala Daerah	Pertemuan	Dokumen	Pemerintah Daerah	5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
									5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
									3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
2	KEGIATAN LAINNYA	5	SOSIALISASI RAD KSB						X	XX	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
									4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
			1	Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tentang RAD KSB	Pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan	Pertemuan	Kegiatan	Pemerintah Daerah	5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
									5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
									3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
2	KEGIATAN LAINNYA	6	MONITORING DAN EVALUASI RAD KSB						X	XX	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			1	Pembentukan Tim Pelaksana Daerah	- Koordinasi dengan multipihak - Penerbutan SK Tim Pelaksana Daerah	Pertemuan	Frekuensi	Pemerintah Daerah	3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
									4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
			2	Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan RAD KSB	Pengumpulan dan analisis data capaian RAD KSB	Pertemuan	Frekuensi	Pemerintah Daerah	4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
									4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
									3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
									3	27	03	1.01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
									X	XX	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			3	Pelaporan hasil Pelaksanaan RAD KSB	Penyusunan laporan Pelaksanaan RAD KSB	Pertemuan	Frekuensi	Pemerintah Daerah	4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
									X	XX	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
									3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
2	KEGIATAN LAINNYA	7	REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN						3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
					1).Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Dokumen Perencanaan	Unit	Pemerintah	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
					2). Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025								
								PROVINSI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
			1 Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi)	3). Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.04	0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara			
				4). Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			
				5).Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan Pembinaan dan Pengawasan	Laporan	Pemerintah	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan			
				6). Rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan			
				7). Pembangunan gully plug	Bangunan Gully plug	Unit	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug			
				8). Pembangunan Dam Penahan	Bangunan Dam Penahan	Unit	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan			
				9). Pembangunan Sumur resapan	Bangunan Sumur Resapan	Unit	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.04	0010	Pembangunan Sumur resapan			
				10). Pemeliharaan tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.04	0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2			
				2 KEGIATAN LAINNYA	7 REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	2 Perbenihan Tanaman Hutan (Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi)	1). Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha	Unit Usaha	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan
							2). Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih	Sertifikat	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih
3).Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih	Sertifikat	Pemerintah dan Masyarakat				3	28	03	1.09	0003	Sertifikasi Mutu Benih				
4). Sertifikasi Mutu Bibit	Bibit tanaman	Sertifikat	Pemerintah dan Masyarakat				3	28	03	1.09	0004	Sertifikasi Mutu Bibit				
5).Pengawasan Peredaran Benih Dan/Atau Bibit	Data (Asal usul, jenis Mutu) Benih atau Bibit	Laporan	Pemerintah dan Masyarakat				3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit				
6). Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat				3	28	03	1.09	0006	Pembangunan Sumber Benih				
7). Pengelolaan Sumber Benih	Luas Sumber Benih	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat				3	28	03	1.09	0009	Pengelolaan Sumber Benih				
8). Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	Kegiatan pembinaa	Kali	Pemerintah dan Masyarakat				3	28	03	1.09	0008	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan				
9). Pembuatan Dan Pengadaan Bibit Untuk Rehabilitasi Lahan	Bibit tanaman	Batang	Pemerintah dan Masyarakat				3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan				
2 KEGIATAN LAINNYA	8 PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT YANG BELUM TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	1 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Orang	Orang	Masyarakat	2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				
			2 Iuran Jaminan Kematian		Orang	Orang	Masyarakat	2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			
			3 Iuran Jaminan Kesehatan		Orang	Orang	Masyarakat	1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat			
2 KEGIATAN LAINNYA	9 KOORDINASI PENGELOAAN DBH SAWIT		Koordinasi dalam rangka			Pemerintah dan	5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi				

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025						
								PROVINSI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
			1 perencanaan DBH Sawit		Pertemuan	Frekuensi	Masyarakat	5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
			2 Koordinasi dalam rangka pelaksanaan DBH Sawit		Pertemuan	Frekuensi	Pemerintah dan Masyarakat	5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	
			3 Koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi DBH Sawit		Pertemuan	Frekuensi	Pemerintah dan Masyarakat	5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
								5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
								5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	